

Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Pengaruhnya Terhadap Harga Beras di Sulawesi Selatan

Jumriani Dambe¹, Hamsiah²

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
Email : jumriani@itbmpolman.ac.id¹; hamsiah@itbmpolman.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur dampak HET terhadap volatilitas harga beras, menggunakan deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga beras di Sulawesi-Selatan. Sebelum kebijakan HET di terapkan, terjadi Peningkatan sebesar 1 gram pada volume beras keluar akan menurunkan volalitis harga beras sebesar 0.899 rupiah

Kata kunci: Kebijakan, HET dan Harga beras

Korespondensi Email : jumriani@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.59903/ebusiness.v3i1.66>

Diterima Redaksi : 12-06-2023 | **Selesai Revisi** : 25-07-2023 | **Diterbitkan Online** : 30-07-2023

1. Pendahuluan

Beras merupakan komoditas strategis yang mendapat prioritas dalam program pembangunan nasional, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah jika ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi.

Kesenjangan harga yang terjadi pada sisi produsen dan konsumen seringkali berakibat pada harga beras/gabah yang di terima petani dan konsumen menjadi tidak pasti. Ketidakpastian harga pada tingkat petani merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi petani. Ketidakpastian harga beras/gabah semakin tidak pasti ketika terjadi volatilitas harga output. Pada komoditas padi atau beras, tingkat volatilitas harga produsen beras di Indonesia (15.46 persen) lebih tinggi jika dibandingkan volatilitas harga konsumen beras di Indonesia (10.47 persen).

Konsep harga dasar selanjutnya disesuaikan menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) per 1 Januari 2002 dan kemudian menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada tahun 2005 (Maulana, 2012). Namun saat ini kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi karena harga yang belaku di pasar sudah melebihi HPP yang ditetapkan. Kemudian dituangkan dalam kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.



Gambar 1. Peta perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Metode Penelitian

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan perberasan (HET) dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data harga jual beras yakni harga pada tingkat petani dan pedagang, serta kajian yang diperoleh dari studi pustaka dan dari beberapa instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

2.3. Metode Analisis Data

Tujuan penelitian yang kedua adalah Untuk mengukur bagaimana dampak kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) terhadap volatilitas harga beras, dan efektivitas penerapan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Variabel yang digunakan adalah harga eceran beras di tingkat petani dan harga eceran pada pasar eceran di Sulawesi Selatan.

Untuk Mengukur Bagaimana Dampak Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) Terhadap Volatilitas Harga Beras Menganalisis dampak kebijakan HET terhadap volatilitas menggunakan regresi linear sederhana. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menghitung besar pengaruh variable independen (Y) terhadap variable dependen (X). Adapun rumus regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Dimana :

Y = Volatilitas harga beras di Provinsi Sulawesi-Selatan (Independen)

α = Konstanta

x1= Nilai tukar riil

x2= Volume beras keluar

x3= Kebijakan HET

b1= Koefisien regresi variable nilai tukar riil

b2= Koefisien regresi variable volume beras keluar

b3= Koefisien regresi variable Kebijakan HET

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) terhadap volatilitas harga beras.

Bentuk kebijakan ini disesuaikan dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan ekonomi beras nasional. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program stabilisasi harga pangan dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai perilaku harga komoditas yang bersangkutan. Cakupan informasi yang dibutuhkan tidak hanya meliputi kecenderungan ataupun arah perubahannya, tetapi juga mencakup pula volatilitasnya.

Pada akhir Agustus 2017, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium dan premium sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 yang berlaku efektif pada 1 September 2017. Penetapan HET tersebut ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, keterjangkauan harga beras di konsumen serta mencegah terjadinya spekulasi harga. Diluar dari tujuan tersebut, penetapan HET beras sampai saat ini masih menuai kontroversi. Salah satunya dampak negatif yang ditimbulkan dari penetapan HET berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya petani (Buletin APBN, 2017).

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

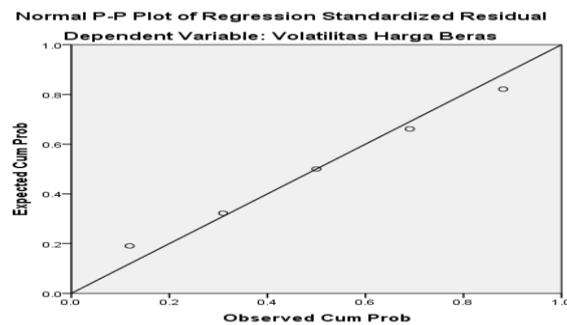
Pengujian asumsi dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-smirnov dengan melihat nilai signifikansi $> \alpha$ dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : residual berdistribusi normal

H1 : residual berdistribusi tidak normal

Uji grafik residual

Salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Berikut merupakan grafik normal probability plot pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik normal probability plot

Berdasarkan grafik diatas, Jika melihat grafik normal probability plot , secara kasat mata terlihat bahwa semua titik residual berada disekitar garis lurus. sehingga kita menyimpulkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas. Hal ini juga di perkuat oleh uji Kolmogorov smirnov dimana p-value > 0.05 maka terima h0 yang artinya residual berdistribusi normal.

		Standardized Residual
N		5
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.70710678
	Absolute	.143
Most Extreme Differences	Positive	.143
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

Tabel 1. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

Catatan : Test distribution is normal

Calculated from data.

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dimana nilai signifikansi (Sig.) 1.000 lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, kemudian Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

3.2. Pembahasan

Langkah pemerintah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pangan dari hasil penelitian memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga beras di Sulawesi-Selatan. Sebelum kebijakan HET di terapkan, terjadi Peningkatan sebesar 1 gram pada volume beras keluar akan menurunkan volatilitas harga beras sebesar 0.899 rupiah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2017 pemerintah melalui kementerian perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) berlaku efektif pada 1 september 2017. Penetapan kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras di tingkat konsumen. Akan tetapi, dampak negatif yang di timbulkan dari penetapan HET berpotensi merugikan petani. Penetapan kebijakan HET tersebut semestinya harus mempertimbangkan kebijakan HPP.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya perhatian pemerintah dalam mengakomodasi volatilitas harga beras yang masih terjadi di Sulawesi-Selatan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir terjadinya volatilitas harga beras.

5. Daftar Pustaka

- [Bps] Badan Pusat Statistik. 2016. Distribusi Perdagangan Beras Indonesia. Jakarta (Id): Badan Pusat Statistik.
- Maulana Mohamad. 2012. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Multikualitas Gabah Dan Beras Di Indonesia (Prospect Of Government's Purchase Price For Multi-Quality Rice In Indonesia). Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Jakarta.
- Maulana, 2012, Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Multikualitas Gabah Dan Beras Di Indonesia Prospect Of Government's Purchase Price For Multi-Quality Rice In Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.
- Sawit, M.H. 2010. Reformasi Kebijakan Harga Produsen Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Sudana, Wayan. 2011. Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Urea dan Harga Gabah Pembelian Pemerintah di Beberapa Sentra Produksi Padi. Jurnal Iptek Tanaman Pangan Vol. 6 No. 1,